

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L.(2003). *Implementasi Kebijakan Publik : Model dan Proses*. Bandung:Alfabeta.
- Dunn, William. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dye, T. R. (2013). *Kebijakan publik* (Diterjemahkan oleh Riant Nugroho). Gava Media.
- Edward III, 2017. *Implementation Public Policy*. By LA ODE YUSRAN SYARIF On April, 13:2017 Washington DC : Congressional Quarter Press.
- Hamdi, Muchlis. (2014). *Kebijakan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Lembaga Administrasi Negara. (2015). *Pedoman jabatan fungsional analisis kebijakan*. Jakarta: LAN RI.
- Lembaga Administrasi Negara. (2022). *Penguatan peran analisis kebijakan dalam peningkatan kualitas kebijakan publik*. Jakarta: LAN RI.
- Mazmanian, Daniel A. dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. USA: Scott Foresman and Company.
- Meter, D. S. V., & Horn, C. E. V. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Mulyadi,D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik : Konsep dan Aplikasi Proses kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. I Carbohydrate Polymers
- Nugroho, R. (2009). *Public policy: Teori & model, perumusan, implementasi,pengendalian, monitoring & evaluasi, risk managemen, kebijakan unggul, the fifth estate, metode penelitian kebijakan* (Edisi ke-3, rev.). PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Sugiono.(2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Tahir, A. (2014). *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Alfabeta.

Thoha, M. (2014). *Birokrasi dan politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Van Meter, Donald S. dan Carl E. Van Horn. 1975. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework". *Administration and Society*, Vol. 6 No. 4. Hal. 445-488.

Wahab, S. A. (2001). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Bumi Aksara.

Wahab, S. A. (2012). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Bumi Aksara.

Wahab, Solichin Abdul. (2015). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kependusunan Model-Model Impelementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Caps. 2012.

Winarno, B. (2014). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. CAPS (Center of Academic Publishing Service

Jurnal dan artikel :

Azhari Puti Mutiara , Franky , Utama Zahera Mega, (2024), Analisis Implementasi Kebijakan Penyetaraan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Di Lingkungan Kemendikbudristek. *Jurnal ekonomi manajemen sistem informasi*.

Fatmawati, F., Harakan, A., & Hawing, H. (2021). Strategi Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Dalam Mengembangkan Objek Wisata

Permandian Alam Lewaja Di Kabupaten Enrekang. *Kybernology: Journal of Government Studies*, 1(1), 1-15.

Fitrianingrum, Lia (2020), Implementasi Kebijakan Penyetaraan Jabatan Pengawas kedalam Jabatan Fungsional di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. *Prosiding Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 4.0*

Massepe, A Pangerang Batara Bau , Daraba Dahyar & Sinurat Marja (2024), Implementasi Penyetaraan Jabatan Dalam Pengembangan Karier Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, *Journal of Government, Social and Politics*, 10(2).

Matland, R. E. (1995). Synthesizing the implementation literature: The ambiguity-conflict model of policy implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 5(2), 145–174.

O'Toole, L. J. (2000). Research on policy implementation: Assessment and prospects. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 10(2), 263–288.

<https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a024270>

Pratama, Dicky Hariya, Wibowo, Gatot DH , Purnomo, Chrisdianto Eko (2023), Implementasi Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Provinsi NTB), *Journal of community engagement*, 4(3) 931-942

Reswananda, I Gede Agung Wiweka (2021), Implementasi Kebijakan Penyetaraan Jabatan Di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. Institut Pemerintah Dalam Negeri.

UNDANG - UNDANG :

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi No 45 tahun 2013 Tentang Jabatn fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

